

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku ;

- Arianto, Satya, *Hukum Dan Demokrasi*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, 1991.
- Anwar, Chairul. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999.
- Abdul Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- , *Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah Dan Pergeseran Paradigma*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI-Press. 1995.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni. 1997.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. 2014.
- Bintan R Saragih, *Clean Government Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum*. Jakarta: Pidato Ilmiah UNTAG. 1994.
- Budiharjo Miriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kekuasaan Dan Wibawa*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1984.
- , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- , *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia, 1975.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya. 1992.
- Eko Susilo Madyo dan Triyanto Bambang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Semarang: Dehara Prize, 1995.
- Hiariej, O.S. Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Edisi Revisi. 2015
- *Hukum Pidana*. Tangerang: Universitas Terbuka. 2016.
- H. Harris Soche, *Supermasi Hukum Dan prinsip Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Hanindita Offset. 1985.

- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2007.
- Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan Ham*. Malang: Setara Press. 2018.
- Kusnardi Moh dan Ibrahim Harmaili, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet ke-7*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV Sinar Baksi, 1988.
- Kusnardi Moh, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta : Gramedia, 1994.
- Nasution,Buyung, Adnan,Arus *Pemikiran Konsitusionalisme Hukum dan Pradilan*, Jakarta:Kata Hasta ,2007.
- Laksono Fajar dan Subardjo, *Kontroversi Pengesahan Undang-Undang Tanpa Pengesahan presiden*, Yogyakarta, UII Press, 2006.
- Muladi Dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*,Bandung,Alumni, 1992.
- Manan, Bagir, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia. 2009.
- Muhammad Eka Putra dan Abdul Khair, *Sistem Pidana Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*,Medan. USU Press,2010
- Maskur Hidayat, *Konsep Negara Kemaslahatan, Telaah Terhadap Teori Negara Menurut Imam Al Mawardi, Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau*. Surabaya: Laros. 2015.
- Reza A.A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.1955.
- Soetidjo, *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Rineka Cipta.1990
- Syaukani, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Kaltim: Gerbang Dayaku. 2001.
- Sadu Wasistionao, *Dilema Efisiensi Birokrasi Daerah*. Jatinangor : CLGI. 2003.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Soemantri, Sri, *Sistem dan Prosedur Konstitusi*. Bandung: Alumni.2006.
- Sarja, *Negara Hukum teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media. 2016.

Sibuea. Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga. 2010.

_____, *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga. 2014.

_____, dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2020.

_____, dan Asmak ul Hisnah. *Sendi-sendi Hukum Konstitusional, Problematika Wewenang Organ Negara Dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Rajawali Pers. 2020.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok, Rajawali Pers. 2019.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

Willy D.S. Voll, *Negara Hukum Dalam Keadaan Pengecualian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Yuswalina, *Hukum Administrasi Negara*. Malang: Setara press. 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. (LN No. 6 TLN 1143)

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*. (LN No.38. TLN No. 3037)

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa*. (LN No.56. TLN No. 3153)

- Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. (LN. No. 60. TLN. No. 3839)
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme*. (LN No. 75, TLN.3851)
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (LN No. 140. TLN No. 3874)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (LN. No. 134. TLN No. 4150)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. (LN No. 125. TLN No. 4437)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara* (LN No. 6. TLN No. 5494)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (LN No. 7, TLN No. 5495)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*., (LN No. 244, TLN No. 5587)

A. Karya Ilmiah

- Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah disampaikan pada Penataran Dosen Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum BKS-PTN Bidang Hukum Se-Wilayah Barat, Fakultas Hukum Lampung, Bandar Lampung, 1994
- Bambang Yudoyono, *Makalah Telaah Kritis Implementasi UU No. 22/1999: Upaya Mencegah Disintegrasi Bangsa*, disampaikan pada Seminar dalam rangka Kongres ISMAHI. Bengkulu. 2000.
- Pardjoko, *Filosofi Otonomi Daerah Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999*, Makalah Falsafa Sains (PPS 702), Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor. 2002.
- Samsul Bachri, *Otonomi Daerah Dalam Prospektif Struktur dan Fungsi Struktur dan Fungsi Birokrasi Daerah*, Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Otda Dalam Prospektif Indonesia Baru, Makassar. 1999.

B. Jurnal Hukum

Yongki Putut Angkianata, *Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia*, Universitas Brawijaya: Malang, 2015.

Arif Sumeru, *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Universitas Airlangga; Surabaya, JKMP (ISSN.2338-445X), Vol.4, No, 1, Maret 2016.

Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Universitas Hasanuddin Makassar: Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2003

Sugiman, *Pemerintah Desa*, Universitas Suryadarma, Binamulia Hukum, Jakarta; Vol. 7 No. 1. Juli 2018.

Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*, Yogyakarta; Fiat Jusstisia Jurnal Hukum (ISSN 1978-5186) Vol,9 No.4 Oktober-Desember 2015.

C. Internet ;

<http://m.mediaindonesia.com>.,BNP:473 Kades Telah Taseret Korupsi Dana Desa., Februari 2020.

<https://putusan.3mahkamahagung.go.id>., Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<http://www.djkg.go.id>.,Kebijakan Dana Desa Tahun 2021.

<http://www.jogloabang.com>., Undang-Undang Desa, Februari 2020.

<http://indonesiabaik.id/infografis/Sipa-Sipa-Saja-Yang-Termasuk-Asn>

<http://busnees-law.bunus.ac.id>., Siapa Subjek Tindak Pidana Korupsi., Februari 2017.

<http://www.hukumonline.com>.,Sekali Lagi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, April 2016.

<http://www.hukumonline.com>., memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor, Februari 2017.

D. Kamus ;

Kamus Besar Bahasa Indonesia., Medan : Bitra Indonesia, Medan. 2013